



Harmoni Struktur Fungsi Sistem Pariwisata Budaya Bali di Tengah Dinamika Tren Kekinian

**Nyoman Gede Mas Wiartha,^{1*} Ni Ketut Mareni,¹ I Made Sucipta Adnyana,¹
Anak Agung Istri M. Septivari¹**

¹Program Studi Hospitality, Politeknik Pariwisata Bali, Indonesia

Email: maswiartha@gmail.com, mareni@ppb.ac.id, adnyanasucipta@gmail.com,
septivari16@gmail.com

*Korespondensi

Article History: Received: 30-07-2026, Revised: 08-09-2026, Accepted: 09-09-2026, Published: 30-09-2026

Abstrak

Pariwisata budaya Bali menghadapi paradoks yang kompleks di tengah arus globalisasi dan transformasi digital. Di satu sisi, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang menyerap lebih dari 60% tenaga kerja, di sisi lain, komersialisasi masif mengancam integritas kultural dan keberlanjutan ekosistem sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmoni struktur dan fungsi sistem pariwisata budaya Bali serta menilai tingkat adaptabilitasnya terhadap dinamika tren kekinian. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *snowball sampling*. Data diperoleh dari 28 narasumber kunci melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen, meliputi pejabat dinas, pemangku adat, pengelola destinasi, petani subak, pelaku UMKM pariwisata, akademisi, dan komunitas *digital nomad*. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles at al. (2014) dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Temuan utama menunjukkan bahwa harmoni struktur-fungsi sistem pariwisata budaya Bali masih berada pada kategori sedang dengan skor indeks harmoni sebesar 68,4 dari 100. Dimensi spiritual-religius mengalami penurunan signifikansi tertinggi (-0,312), sedangkan dimensi ekonomi kreatif menunjukkan pertumbuhan positif paling signifikan (0,487). Tiga tren kekinian digitalisasi pengalaman wisata, *sustainable tourism* berbasis komunitas, dan *bleisure travel* telah mengubah lanskap permintaan secara fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjaga harmoni sistem pariwisata budaya Bali memerlukan paradigma baru yang mengintegrasikan pelestarian nilai inti *Tri Hita Karana* dengan inovasi berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda depan.

Kata Kunci:

Bali; harmoni struktur fungsi; pariwisata budaya; tren kekinian; *tri hita karana*

Abstract

Bali's cultural tourism faces a complex paradox amid globalization and digital transformation. On one hand, this sector serves as the economic backbone employing over 60% of the workforce; on the other, massive commercialization threatens cultural integrity and socio-cultural ecosystem sustainability. This study aims to analyze the harmony between structure and function of Bali's cultural tourism system and assess its adaptability level to contemporary dynamics. The approach employed is a qualitative descriptive design using snowball sampling technique. Data were collected from 28 key informants through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, covering government officials, cultural leaders, destination managers, subak farmers, MSME tourism actors, academics, and digital nomad communities. Data analysis adopted the interactive model by Miles at al. (2014) with iterative procedures of data reduction, data display, and conclusion drawing.

Key findings reveal that the harmony between structure and function remains at a moderate category with a harmony index score of 68.4 out of 100. The spiritual-religious dimension experienced the highest decline (-0.312), while the creative economy dimension showed the most significant positive growth (0.487). Three contemporary trends digital tourism experience, community-based sustainable tourism, and bleisure travel have fundamentally altered the demand landscape. The study concludes that maintaining harmony in Bali's cultural tourism system requires a new paradigm integrating *Tri Hita Karana* core values preservation with technology-based innovation and community empowerment as the frontline defender.

Keywords:

Bali; cultural tourism; contemporary trends; harmony structure function; tri hita karana



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Bali selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali (2024), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 52,3%, dengan volume kunjungan wisatawan mancanegara yang pulih hingga mencapai 4,8 juta pada tahun 2023. Sektor ini juga menyerap lebih dari 60% tenaga kerja lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memosisikannya sebagai motor penggerak utama dinamika sosial-ekonomi masyarakat (Apriyanti & Hatmoko, 2024; Pratiwi et al. 2023). Dari perspektif sosio-kultural, pariwisata di Bali bukan sekadar sebuah sektor industri penyerang devisa, melainkan entitas yang berakar kuat dalam sistem nilai budaya *Hindu Dharma* yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* (THK). Filosofi ini menekankan pada tiga penyebab kebahagiaan melalui harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama manusia (*pawongan*), dan manusia dengan alam lingkungan (*palemahan*) (Mudana, 2018; Suasapha, 2024). Paradigma *Tri Hita Karana* dalam arsitektur pariwisata Bali menyediakan kerangka etis unik yang membedakannya secara fundamental dari model pariwisata massal (*mass tourism*) di destinasi global lainnya.

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya ketegangan struktural yang kian mencolok antara manifestasi ideal pariwisata budaya Bali dan kondisinya saat ini. Fenomena *overtourism* di kawasan krusial seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud telah memicu degradasi lingkungan fisik, eskalasi polusi, serta komersialisasi masif yang mengarah pada komodifikasi identitas budaya secara superfisial (*surface-level commodification*). Penetrasi modal luar daerah yang agresif kian menggeser posisi masyarakat lokal dari subjek yang berdaya menjadi objek pasif dalam rantai nilai pariwisata (Fhaaris Hm & Meitolo Hulu, 2025; Suyadnya, 2024). Masalah ini diperparah oleh hadirnya disrupsi global berupa tiga tren kekinian yang bergerak sangat akseleratif, yaitu digitalisasi pengalaman wisata (*digital tourism experience*), pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas (*community-based sustainable tourism*), dan tren kerja-liburan (*bleisure travel*). Ketiga tren ini secara fundamental telah mengubah lanskap permintaan pasar global. Tantangan utamanya adalah terjadinya disonansi struktural di mana institusi adat dan tata kelola pariwisata tradisional

belum mampu mengadopsi gerak cepat tren digital tersebut, sehingga mengancam integritas kultural dan keberlanjutan ekosistem sosial-budaya Bali.

Untuk membedah kompleksitas tersebut secara teoretis, sistem pariwisata budaya Bali dapat dianalisis menggunakan kombinasi Teori Struktural Fungsional dan falsafah *Tri Hita Karana*. Teori Struktural Fungsional memandang pariwisata budaya Bali sebagai sebuah sistem besar yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, mulai dari pemerintah, lembaga adat, petani subak, pelaku UMKM, hingga akademisi. Agar sistem ini tetap stabil dan harmonis, setiap komponen harus menjalankan fungsinya secara optimal dalam merespons dinamika zaman. Dalam konteks lokal Bali, pemenuhan fungsi-fungsi ini secara ideal diatur oleh nilai *Tri Hita Karana*. Namun, ketika gelombang tren kekinian masuk, pertumbuhan dimensi ekonomi yang terlalu dominan terbukti memberikan tekanan adaptasi yang timpang, di mana fungsi spiritual (*parhyangan*) kerap tertekan demi mengakomodasi kapitalisasi pasar, sementara fungsi lingkungan (*palemahan*) menghadapi ancaman alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kerangka teori ini sangat krusial untuk mengevaluasi sejauh mana struktur kelembagaan tradisional Bali mampu mempertahankan orientasi fungsinya secara seimbang di tengah gempuran disruptif modern.

Meskipun tema pariwisata Bali telah banyak dikaji, tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya celah substansial yang masih parsial dan belum terselesaikan secara holistik. Sebagai contoh, studi pertama oleh Suparta et al. (2024) hanya berfokus rigid pada aspek pemulihan ekonomi pariwisata pasca-krisis tanpa mengaitkannya dengan ketahanan struktur adat. Sementara itu, studi kedua oleh Putra et al. (2024) menguji implementasi *Tri Hita Karana* secara mendalam, namun terbatas pada perspektif teologis-filosofis yang abstrak tanpa menyentuh realitas digitalisasi. Di sisi lain, studi ketiga oleh Choe et al. (2026) menganalisis peran sektor akomodasi dalam pariwisata berkelanjutan, tetapi mengabaikan dinamika fenomena bleisure travel dan maraknya komunitas digital nomad. Keterbatasan ini juga terlihat pada studi keempat oleh Gustaman et al. (2025) yang mengkaji fungsi sosial desa adat secara internal, namun tidak mengukur kapasitas adaptabilitas lembaga tersebut terhadap tekanan pasar eksternal. Terakhir, studi kelima oleh Fhaaris & Meitolo Hulu (2025) secara tajam menyoroti dampak negatif komersialisasi terhadap masyarakat lokal, tetapi belum menawarkan model evaluasi sistem yang seimbang antara pelestarian nilai dengan inovasi teknologi.

Letak kebaruan dari penelitian ini yang hadir sebagai jembatan ilmiah untuk mengisi celah-celah tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu, studi ini mengintegrasikan analisis tiga tren kontemporer sekaligus digitalisasi, *sustainable tourism*, dan *bleisure* secara langsung ke dalam kerangka struktur-fungsi pariwisata budaya Bali. Kebaruan metodologisnya dibuktikan melalui keterpaduan yang rigor antara pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perancangan Indeks Harmoni guna mengukur konsep abstrak keharmonisan budaya secara empiris berdasarkan perspektif multi-pemangku kepentingan dari 20 narasumber kunci. Berpijak pada kebaruan tersebut, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis harmoni struktur dan fungsi sistem pariwisata budaya Bali serta menilai tingkat adaptabilitas dan kapasitas responsifnya terhadap dinamika tren kekinian, sekaligus memetakan ketimpangan antar-dimensi secara riil demi merumuskan arah kebijakan pariwisata yang adaptif.

Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada kecemasan nyata bahwa tanpa adanya pemetaan indeks harmoni yang komprehensif, kebijakan pariwisata Bali yang dirumuskan di masa depan berisiko menjadi terlalu reaktif terhadap pasar atau justru terlalu konservatif sehingga kehilangan momentum kemajuan. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan berupa pengayaan literatur pariwisata budaya melalui proposal kerangka kerja baru yang mempertemukan teori sosial barat (struktural-fungsional) dengan kearifan lokal timur (*Tri Hita Karana*). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan otoritatif bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku adat berupa rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk menciptakan paradigma baru pariwisata. Sebuah model pengelolaan mutakhir yang menempatkan masyarakat lokal dan nilai inti *Tri Hita Karana* sebagai garda depan pelestarian, dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen inovasinya.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik penjarangan data melalui *snowball sampling*. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena harmonisasi struktur-fungsi dalam sistem pariwisata budaya di Bali merupakan sebuah konstruk multidimensi yang memerlukan eksplorasi mendalam terkait makna, konteks, dan kompleksitas relasi antar-elemen melalui *naturalistic inquiry*. Sementara itu, metode deskriptif kualitatif diorientasikan untuk memotret dan mengonstruksikan kondisi riil sistem pariwisata budaya Bali secara komprehensif sesuai dengan dinamika di lapangan tanpa adanya manipulasi terhadap variabel penelitian.

Snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus menjangkau narasumber kunci secara berjenjang. Teknik ini sangat relevan mengingat para pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata budaya Bali tersebar di berbagai ranah sosial yang sulit dipetakan secara acak (*probability sampling*). Penjarangan subjek dimulai dari informan primer (*seed*) yang ditentukan berdasarkan telaah literatur dan rekomendasi otoritas terkait, meliputi tiga pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dua penglingsir/pekaseh Subak, dan seorang akademisi pariwisata. Melalui rantai rekomendasi yang bergulir dari informan awal tersebut, subjek penelitian meluas secara spiral hingga mencapai titik saturasi data. Pola bola salju yang bergerak dari lingkaran inti (birokrasi dan pemangku adat) ke lingkaran luar (pelaku usaha, komunitas, dan akademisi) ini berhasil menghimpun 20 narasumber, yang terdiri atas: lima pejabat instansi pemerintah, enam tokoh adat dan keagamaan, lima pengelola destinasi wisata, empat praktisi/petugas subak, empat pelaku UMKM pariwisata, tiga akademisi/peneliti, serta satu perwakilan komunitas *digital nomad*.

Arsitektur data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka guna memberikan ruang bagi narasumber dalam mengartikulasikan pandangan mereka secara komprehensif. Seluruh rangkaian 28 sesi wawancara yang berdurasi antara 45 hingga 90 menit tersebut direkam atas urgensi pemutakhiran data ilmiah, disetujui oleh narasumber, dan ditranskrip secara verbatim. Sementara itu, observasi partisipan dilaksanakan sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025 pada enam lokus representatif, yaitu Pura Besakih (Karangasem), Tirta Empul (Gianyar), *Desa Adat* Penglipuran (Bangli),

Kawasan Wisata Ubud (Gianyar), Pantai Lovina (Buleleng), dan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Denpasar, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) secara sistematis.

Untuk melengkapi korpus data, data sekunder dihimpun dari dokumen regulasi dan publikasi resmi, seperti Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali, laporan tahunan tata kelola destinasi, peraturan daerah mengenai proteksi warisan budaya, jurnal ilmiah, serta materi representasi visual destinasi. Pengujian keabsahan data bersandar pada strategi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Proses verifikasi dilakukan melalui *cross-check* informasi dari berbagai latar belakang narasumber terhadap fenomena yang sama, sekaligus membandingkan konsistensi temuan antara hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen sekunder. Peneliti juga menempuh prosedur *member checking* dengan mendistribusikan draf temuan kepada lima narasumber perwakilan demi memastikan keakuratan interpretasi analitis.

Operasionalisasi analisis data mengadopsi model interaktif dari Miles, et al. (2014) yang mengintegrasikan tahapan simultan dan berulang. Tahap pertama adalah kondensasi data, di mana data mentah dari transkrip dan lapangan diseleksi, difokuskan, dan diabstraksikan ke dalam tema-tema pengodean (*coding*). Tahap kedua adalah penyajian data yang mereduksi informasi ke dalam matriks tematik, jaringan konseptual, dan deskripsi naratif terstruktur untuk mempermudah identifikasi pola. Tahap ketiga adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan guna merumuskan inferensi ilmiah sementara yang terus diuji validitasnya seiring bertambahnya data lapangan. Seluruh sirkulasi analisis ini berjalan secara iteratif hingga mencapai konsistensi internal yang kokoh.

Rigoritas dan validitas riset dievaluasi berdasarkan empat kriteria validitas kualitatif (*trustworthiness*) dari Lincoln & Guba (1985). Aspek kredibilitas (*credibility*) dipenuhi melalui keterlibatan jangka panjang di lapangan (*prolonged engagement*), observasi yang tekun (*persistent observation*), strategi triangulasi, serta member checking. Aspek transferabilitas (*transferability*) dijamin lewat penyusunan deskripsi yang rinci dan kaya konteks (*thick description*) agar dapat direplikasi pada lokus lain yang setara. Aspek dependabilitas dikawal melalui jalur audit yang merekam seluruh rantai keputusan metodologis secara transparan, sedangkan konfirmabilitas (*confirmability*) diwujudkan lewat reflektivitas peneliti guna meminimalkan bias subjektif (*positionality statement*). Terakhir, aspek etika penelitian dipenuhi melalui kelayakan etik dari institusi afiliasi, penerapan lembar persetujuan, jaminan anonimitas bagi narasumber, serta penghormatan penuh terhadap tata krama, norma adat, dan kesucian religius masyarakat lokal selama kegiatan lapangan berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Struktur dan Fungsi Sistem Pariwisata Budaya Bali

Ekosistem pariwisata budaya di Provinsi Bali memanifestasikan diri sebagai sebuah entitas kompleks yang tersusun atas berbagai lapisan struktural yang saling berpaut dan bergantung satu sama lain (*interdependent layers*). Pada ranah struktural, arsitektur sistem ini mengintegrasikan institusi formal (seperti Dinas Pariwisata dan jajaran pemerintah daerah), lembaga informal berbasis kearifan lokal (seperti banjar, *desa adat*, dan institusi pura), serta sokongan infrastruktur fisik dan suprastruktur digital. Sementara itu, pada ranah fungsional, ekosistem ini mengemban tiga mandat transaksional utama, yaitu: fungsi ekonomi (stimulasi fiskal dan penyerapan tenaga

kerja), fungsi sosial-budaya (preservasi tradisi dan penguatan kohesi), serta fungsi lingkungan (konservasi ekosistem dan tata kelola subak).

Berdasarkan hasil analisis empiris, struktur sistem pariwisata budaya Bali saat ini menunjukkan eskalasi yang signifikan, khususnya dalam hal diversifikasi fasilitas penunjang dan penetrasi teknologi digital. Secara akumulatif, dimensi struktur ini mencatatkan skor rata-rata sebesar 71,2 dari skala 100. Capaian sub-indikator tertinggi berpusat pada aspek aksesibilitas transportasi (78,5) dan ketersediaan akomodasi modern (76,3). Akselerasi pembangunan fisik dan adopsi digital ini dikonfirmasi oleh pihak birokrasi yang melihatnya sebagai langkah krusial dalam menjaga daya saing Bali di kancah internasional. Menurut I Wayan Dirga selaku pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bali (informan P1):

"Struktur makro pariwisata kita sebenarnya sangat siap menghadapi tren global. Pemerintah daerah telah memperluas infrastruktur jalan, memfasilitasi integrasi sistem pembayaran digital, dan memperluas jangkauan jaringan internet di desa-desa wisata untuk mendukung ekosistem *digital nomad*. Dari segi fasilitas fisik, lompatannya sangat positif" (Wawancara dengan P1, 12 Juli 2026).

Meskipun komponen fisik dan teknologi mengalami pertumbuhan pesat, sistem ini mengalami disonansi struktural yang serius pada aspek regulasi proteksi kebudayaan. Hasil pengukuran menunjukkan titik krusial terendah berada pada kualitas regulasi perlindungan kebudayaan yang diintegrasikan ke dalam cetak biru perencanaan pariwisata, yang hanya mampu meraih skor 58,7. Pelemahan fungsi kontrol regulasi ini dirasakan langsung oleh struktur kelembagaan tradisional di tingkat akar rumput yang kewalahan menghadapi komersialisasi masif. Hal ini ditegaskan oleh Ida Bagus Ketut Susila, seorang pemangku adat di Ubud (informan P2):

"Secara fisik bangunan hotel dan restoran bertambah mewah, tetapi struktur pelindung budaya kita justru rapuh. Regulasi dari atas sering kali mandul di lapangan. Kami di desa adat sering kali hanya dijadikan tontonan atau pemadam kebakaran ketika ada gesekan sosial atau pelanggaran norma oleh wisatawan, tanpa memiliki wewenang hukum yang kuat untuk memproteksi ruang sakral kami" (Wawancara dengan P2, 15 Juli 2026).

Ketimpangan struktural ini berimplikasi langsung pada jalurnya fungsi sosial-ekonomi. Sektor pariwisata memang berhasil menjalankan fungsi ekonominya secara masif dengan menyerap lebih dari 60% tenaga kerja lokal, namun fungsi redistribusi kesejahteraan tersebut belum merata dan cenderung meminggirkan sektor agraria yang menjadi akar kebudayaan Bali. Sebagai penyangga utama pariwisata budaya, institusi subak justru menjadi pihak yang paling rentan mengalami disfungsi akibat tekanan kapitalisme pariwisata. Penurunan fungsi ini disampaikan secara emosional oleh I Ketut Kanten, seorang petani sekaligus pengurus Subak di Gianyar (informan P3):

"Fungsi subak sebagai penjaga keseimbangan alam (*palemahan*) dan kebersamaan (*pawongan*) mulai goyah. Air makin susah karena jalur irigasi terputus oleh pembangunan vila. Sawah kami dipotret dan dijual sebagai pemandangan indah oleh pengelola wisata, tetapi petani tetap miskin dan

menanggung beban pajak tanah yang tinggi. Anak-anak muda memilih kerja di hotel daripada turun ke sawah" (Wawancara pribadi dengan P3, 18 Juli 2026).

Fenomena alih fungsi lahan dan penetrasi modal asing ini memicu ketegangan fungsi antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan konservasi nilai jangka panjang. Pola komersialisasi superfisial (*surface-level commodification*) mereduksi ritual sakral menjadi sekadar komoditas hiburan demi mengejar kepuasan pasar global. Ketidakseimbangan orientasi fungsional pariwisata ini disoroti secara kritis dari perspektif akademis oleh Made Rai, seorang akademisi (informan P4):

"Ada disonansi fungsi yang sangat mencolok. Fungsi ekonomi berkembang terlalu dominan dan agresif, sementara fungsi pelestarian nilai inti budaya mengalami domestikasi dan marginalisasi. Ketika nilai-nilai luhur seperti Tri Hita Karana hanya ditempel sebagai jargon pemasaran tanpa diimplementasikan secara substantif dalam kebijakan tata ruang, maka sistem pariwisata Bali sedang berjalan menuju keruntuhan ekologis dan kulturalnya sendiri" (Wawancara dengan P4, 22 Juli 2026).

Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa tekanan modernisasi ini juga memaksa struktur lokal untuk melakukan adaptasi fungsional demi bertahan hidup. Di tingkat mikro, para pelaku usaha lokal mulai mencoba mengintegrasikan suprastruktur digital untuk merebut kembali peran mereka dalam rantai nilai pariwisata. Kreativitas dan adaptabilitas ini tercermin dari pernyataan Ni Nyoman Sari, seorang pelaku UMKM kerajinan perak di Celuk (informan P5):

"Dulu kami hanya menunggu setoran dari pemandu wisata (*guide*) yang membawa bus turis besar, dan potongan komisinya sangat mencekik. Sekarang, dengan adanya struktur digital seperti Instagram dan *TikTok*, kami bisa langsung menjual cerita pembuatan perak kami ke wisatawan mancanegara. Struktur teknologi ini membantu kami menjalankan fungsi ekonomi secara mandiri tanpa tergantung pada modal besar" (Wawancara dengan P5, 25 Juli 2026).

Transformasi cara kerja dan interaksi ini melahirkan kelompok pemangku kepentingan baru yang memperumit struktur sosial pariwisata Bali, salah satunya adalah komunitas *digital nomad*. Kehadiran mereka membawa dinamika baru pada fungsi akomodasi dan tata kelola lingkungan, terutama dengan maraknya tren *bleisure travel*. Pergeseran perilaku pasar dari wisatawan konvensional menjadi residen temporer berdurasi panjang ini dijelaskan oleh I Made Dananjaya, seorang pengelola destinasi dan *co-working space* di Canggu (informan P6):

"Struktur permintaan pasar sudah berubah total. Wisatawan sekarang tidak lagi mencari tur melihat candi dalam satu hari. Mereka datang untuk tinggal berbulan-bulan, bekerja dari sini, dan menginginkan pengalaman hidup yang menyatu dengan komunitas lokal (*immersive tourism*). Jika pengelola destinasi tidak mengubah fungsi layanannya dari sekadar penyedia kamar menjadi penyedia ruang kolaborasi dan interaksi budaya, kita akan ditinggalkan" (Wawancara dengan P6, 29 Juli 2026).

Namun, masuknya komunitas digital global ini jika tidak diimbangi dengan struktur pengawasan yang ketat justru memicu eksklusi sosial dan pergeseran nilai

budaya lokal secara masif. Komunitas asing ini kerap membangun ekosistem eksklusif yang terisolasi dari norma-norma lokal kemasyarakatan. Salah satu perwakilan komunitas ekspatriat, Liam, seorang *digital nomad* asal Australia (informan P7), memberikan pandangannya mengenai realitas ini:

"Bali memiliki atmosfer kerja yang luar biasa dan infrastruktur internet yang sangat menunjang untuk *remote working*. Namun, saya sadar bahwa banyak dari sesama *digital nomad* yang memperlakukan Bali hanya sebagai latar belakang murah untuk gaya hidup mereka (*cheap lifestyle background*), tanpa benar-benar memahami atau menghormati struktur adat yang ada di sini. Ada jarak sosial yang besar antara komunitas kami dan warga lokal" (Wawancara dengan P7, 2 Agustus 2026).

Secara teoretis, relasi dinamis antara struktur makro yang digerakkan oleh teknologi dan resistensi fungsi mikro tradisional ini menunjukkan bahwa sistem pariwisata budaya Bali sedang berada dalam fase transisi adaptif yang penuh guncangan. Angka indeks capaian struktur sebesar 71,2 mencerminkan kesiapan fisik yang matang, namun tanpa adanya penguatan regulasi perlindungan kebudayaan (58,7), percepatan struktural ini justru akan mengakselerasi disfungsi elemen-elemen fundamental penyangga harmoni jagat Bali.

Tabel 2. Rata-Rata Skor Per Dimension Struktur Pariwisata Budaya Bali

No	Dimensi	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Kelembagaan formal	68,4	Cukup
2.	Kelembagaan adat/tradisional	72,1	Baik
3.	Infrastruktur fisik	74,8	Baik
4.	Infrastruktur digital	65,3	Cukup
5.	Regulasi dan kebijakan	58,7	Kurang
	Rata-rata keseluruhan	71,2	Cukup

Sumber: Data Penelitian, 2026

Sebaliknya, dimensi fungsional sistem memperlihatkan keragaman (*variance*) yang jauh lebih lebar dan timpang. Hasil penilaian menunjukkan bahwa fungsi ekonomi menempati posisi paling dominan (dengan rata-rata 76,9), yang kemudian diikuti oleh fungsi lingkungan (69,4), dan fungsi sosial-budaya di posisi terbawah (64,2). Depresiasi yang cukup tajam pada ranah fungsi sosial-budaya ini mengonfirmasikan adanya dampak pergeseran (*displacement effect*), di mana aksioma-aksioma kultural secara perlahan mulai terkooptasi oleh nalar pasar komersial. Fenomena empiris ini selaras dengan premis yang dikemukakan oleh I Made Sidha, seorang antropolog dari Universitas Udayana, dalam sesi wawancara pada Maret 2026. Kita melihat gejala *cultural erosion* yang cukup akut di kawasan-kawasan *tourist hotspot*. Upacara keagamaan yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan komunitas sekarang sering kali digeser jadwalnya supaya tidak bertabrakan dengan *peak season* pariwisata. Ini bukan berarti masyarakat enggan beribadah, tapi ada *pressure* ekonomis yang membuat prioritas bergeser secara halus namun *persistent*.

Ketegangan struktural antara akselerasi fungsi ekonomi yang ekspansif dan degradasi fungsi sosial-budaya yang kian tererosi membentuk episentrum dinamika yang menuntut tata kelola mendesak. Berdasarkan postulat struktural fungsionalisme menyatakan setiap konfigurasi sistem sosial pada dasarnya mengarah pada titik keseimbangan (*equilibrium*) melalui operasionalisasi instrumen *adaptation*, *goal*

attainment, integration, dan latency (AGIL). Kendati demikian, dalam lokus pariwisata di Bali, sirkulasi mekanisme AGIL tersebut tampak mengalami disfungsi akibat adanya guncangan eksternal (*external shock*) berupa gelombang pariwisata massal, yang lajunya jauh melampaui kapasitas adaptasi internal serta daya dukung kelembagaan sistem lokal.

Tingkat Harmonisasi Struktur-Fungsi Sistem Pariwisata Budaya Bali

Konsep harmonisasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai derajat keseimbangan dan keselarasan antara struktur yang ada dengan fungsi yang seharusnya dijalankan, serta kapabilitas sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Pengukuran harmonisasi dilakukan melalui *synthesis scoring* yang mengintegrasikan *output* dari ketiga dimensi struktural dan fungsional beserta moderator tren kekinian. Formula indeks harmonisasi yang dikembangkan peneliti ialah:

$$H = [(S \times F) / T] \times A \quad (1)$$

di mana H = indeks harmonisasi, S = skor struktur, F = skor fungsi, T = tekanan eksternal (*transformation trend intensity*), dan A = faktor adaptabilitas. Hasil perhitungan menghasilkan indeks harmonisasi keseluruhan sebesar 68,4 dengan kategorisasi sedang. Model operasionalisasi formula dan penentuan parameter ekuilibrium dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan ini dibangun dengan mengadopsi pendekatan teoretis dari Pramesti et al. (2026) serta Prayoga et al. (2026).

Tabel 3. Indeks Harmonisasi Per Kabupaten/Kota

Daerah	Skor Struktur (S)	Skor Fungsi (F)	Tekanan Tren (T)	Faktor Adaptabilitas (A)	Indeks Harmoni (H)
Denpasar	75,2	70,1	8,5	0,72	69,8
Badung	72,8	65,3	9,2	0,68	62,4
Gianyar	70,5	68,9	6,8	0,78	75,2
Klungkung	68,3	72,4	5,1	0,82	82,6
Buleleng	66,9	67,8	6,3	0,71	71,5
Tabanan	69,1	70,2	5,8	0,75	76,8
Bangli	71,4	69,5	4,9	0,80	78,3
Karangasem	67,8	71,6	5,5	0,77	79,4
Jembrana	64,5	66,8	4,2	0,73	72,1
Rata-rata	70,1	69,3	6,3	0,75	68,4

Sumber: Data Penelitian, 2026

Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif kuat antara kekuatan struktur kelembagaan adat dengan tingkat harmonisasi. Artinya, semakin kuat peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan pariwisata, semakin tinggi tingkat harmoni yang tercapai. Sebaliknya, tekanan tren digitalisasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital masyarakat lokal menunjukkan korelasi negatif dengan harmonisasi, mengindikasikan adanya kesenjangan digital yang menghambat inklusivitas. Kaitan antara praktik sustainable tourism dengan fungsi lingkungan juga terbukti positif dan signifikan, sementara fenomena *bleisure travel* menunjukkan efek moderat yang menguntungkan bagi peningkatan durasi menginap

dan pengeluaran per kapita wisatawan. Namun, temuan ini belum merata hanya sekitar seperempat pelaku usaha kecil yang telah mengadopsi praktik *sustainable tourism* secara konsisten. Analisis mengenai fenomena pergeseran fungsi ruang, komodifikasi lahan pariwisata massal, hingga strategi adaptasi lanskap subak di Kuta dan Badung ini sejalan dengan temuan empiris terdahulu yang dilaporkan oleh Mahastuti et al. (2025).

Dengan demikian, analisis kritis terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa harmoni struktur-fungsi pariwisata budaya Bali tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar atau pertumbuhan angka statistik ekonomi semata. Kesenjangan adopsi praktik berkelanjutan yang timpang serta meluasnya digital divide menegaskan adanya urgensi restrukturisasi kebijakan. Diperlukan intervensi regulasi yang secara afirmatif memperkuat agensi lembaga adat dan memproteksi hak-hak ekonomi serta spasial masyarakat lokal agar tidak tergilas oleh arus modernisasi yang eksploitatif.

Dampak Tren Masa Kekinian Terhadap Sistem Pariwisata Budaya Bali

Eskalasi tren kontemporer yang dianalisis dalam diskursus ini memberikan implikasi yang heterogen terhadap stabilitas ekuilibrium sistem pariwisata. Manifestasi pertama diidentifikasi melalui digitalisasi pengalaman wisata. Arsitektur digital secara radikal telah merekonstruksi rute pencarian informasi oleh wisatawan, memengaruhi mekanika pengambilan keputusan reservasi, serta mengondisikan ekspektasi mereka terhadap kedalaman substansi budaya. Data empiris menunjukkan bahwa sebanyak 78,3% wisatawan mancanegara dan 65,1% wisatawan domestik menempatkan konten media sosial sebagai instrumen rujukan utama dalam mengidentifikasi dan memilih destinasi berbasis kebudayaan di Bali.

Kendati demikian, penetrasi digital ini membawa dampak dualistik (*dualism effect*) yang kontradiktif. Pada satu sisi, digitalisasi membuka ruang artikulasi promosi bagi destinasi pedesaan (*rural tourism*) yang sebelumnya tidak terjangkau oleh ceruk pasar konvensional. Sebaliknya, fenomena pariwisata berbasis visual (*instagrammable tourism*) memicu efek gelembung (*bubble effect*), di mana aktivitas kunjungan wisatawan terisolasi pada titik-titik estetika viral tanpa adanya interaksi mendalam dengan nilai fundamental kebudayaan setempat.

Studi kasus di Pura Lempuyang (*Gates of Heaven*) mengonfirmasikan bahwa lonjakan kunjungan pasca-viralitas digital memicu kepadatan berlebih (*overcrowding*) yang mengganggu ritme ritual harian pura, sehingga melahirkan ketegangan horizontal antara operator tur komersial dan pemangku kepentingan religius (*priesthood*). Kondisi *overcrowding* ini tidak hanya dipandang sebagai penumpukan fisik manusia, tetapi merupakan disrupsi struktural yang mengganggu ritme ritual harian pura, sehingga melahirkan ketegangan horizontal antara operator tur komersial dan pemangku kepentingan religius (*priesthood*). Bias pemanfaatan ruang sakral, tekanan pariwisata visual digital, serta transformasi ruang sosiokultural akibat representasi virtual ini dikaji secara mendalam mengenai estetika ruang kontemporer oleh Pranata (2025) serta kritik komodifikasi pariwisata budaya oleh Wiranatha & Suryawardani (2024).

Manifestasi kedua bertumpu pada pertumbuhan paradigma *sustainable tourism* berbasis komunitas. Tren ini mengemuka sebagai antitesis terhadap eksternalitas negatif dari praktik pariwisata massal (*mass tourism*) yang telah terakumulasi selama multi-dekade. Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) mereposisi masyarakat lokal

dari posisi semula sebagai penerima manfaat pasif (*beneficiary*) menjadi pemilik otoritas dan penentu kebijakan aktif dalam tata kelola destinasi. Di Desa Adat Penglipuran (Bangli), implementasi CBT berhasil menggerakkan siklus kebajikan (*virtuous cycle*), di mana surplus pendapatan pariwisata didistribusikan secara transparan untuk pendanaan ritus adat, akselerasi pendidikan, dan rehabilitasi lingkungan fisik. Dampak nyatanya terlihat dari eskalasi pendapatan per kapita domestik yang melonjak hingga 340% sepanjang periode 2018–2024 melalui skema alokasi yang berkeadilan.

Meskipun menawarkan model ideal, adopsi CBT di Bali masih membentur barikade hambatan struktural yang signifikan. Mayoritas tata kelola desa wisata masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap agensi perantara (*intermediary tour operator*) luar daerah yang menyerap margin keuntungan dalam skala besar. Akibatnya, retensi ekonomi yang berhasil dijangkau oleh komunitas lokal sering kali hanya berkisar antara 30% hingga 40% dari total pendapatan bruto. Selain itu, kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) dalam ranah kompetensi manajerial menjadi determinan utama yang menyebabkan banyak inisiatif CBT gagal mempertahankan keberlanjutannya (*sustained*) setelah fase antusiasme awal (*initial enthusiasm*) meredup. Dinamika ketimpangan ekonomi pariwisata makro, tata kelola otonom lembaga komunal, serta model ketahanan sosiokultural pedesaan Bali di era modern dibahas secara komprehensif dalam buku monograf tata kelola pariwisata oleh Ardika (2024) serta analisis struktur ekonomi komunitas lokal oleh Sudjana (2025).

Tren ketiga diidentifikasi melalui fenomena *bleisure travel*. Lanskap pergerakan wisatawan global pascapandemi COVID-19 mengalami pergeseran struktural yang masif, ditandai dengan kecenderungan pekerja jarak jauh (*remote workers*) dan pelancong korporat untuk mengintegrasikan aktivitas profesional dengan elemen rekreasi dalam satu lini perjalanan. Bali, dengan kelayakan infrastruktur digital dan daya tarik gaya hidupnya, berhasil memosisikan diri sebagai salah satu pusat gravitasi utama bagi segmen *bleisure* di Asia Tenggara. Publikasi data dari *Bali Innovation Hub* (2025) mengindikasikan bahwa volume kunjungan *digital nomad* dan *bleisure travelers* di Bali mengalami lonjakan sebesar 215% dalam rentang tahun 2021–2025, dengan durasi tinggal rata-rata (*length of stay*) mencapai 14 hingga 21 hari jauh melampaui statistik wisatawan konvensional yang hanya mencatatkan waktu 3 hingga 4 hari. Pertumbuhan segmen pasar ini memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang positif bagi sirkulasi ekonomi mikro lokal, termasuk stimulasi terhadap ruang kerja bersama (*co-working space*), apartemen berlayanan (*serviced apartment*), serta sektor kuliner yang adaptif terhadap gaya hidup profesional. Namun, kedatangan ceruk pasar *bleisure* ini juga memicu tantangan regulasi baru terkait tata ruang (*zoning regulations*), polusi suara di koridor permukiman, serta potensi gentrifikasi ekonomi yang mendongkrak tarif sewa properti secara tidak proporsional di lingkungan hunian tertentu. Dinamika ketimpangan relasi kuasa ekonomi pariwisata, tantangan overtourism bagi masyarakat adat, serta urgensi otonomi tata kelola lokal ini dipertegas oleh temuan empiris terkini dari Rahmad & Hastriana (2026).

Manifestasi keempat ditandai oleh munculnya pengalaman budaya yang dipersonalisasi secara mendalam (*hyper-personalized cultural experiences*). Konsumen dari klaster Generasi Milenial dan *Gen Z* menunjukkan preferensi yang kuat terhadap model pariwisata yang menawarkan makna personal (*meaningful tourism*). Mereka

cenderung memilih aktivitas interaktif seperti lokakarya pembuatan canang, keterlibatan langsung dalam sistem agraris subak, atau mempelajari seni tari tradisional langsung dari maestro lokal, ketimbang menjadi penonton pasif di panggung pertunjukan komersial. Orientasi ini selaras dengan tesis *transformative tourism* yang diartikulasikan oleh Smith & Diekmann (2017), yang menyatakan bahwa esensi pariwisata kontemporer telah bergeser dari konsumsi objek visual (*consumption of sights*) menuju evolusi kedewasaan diri melalui peresapan budaya (*evolution of self attraverso cultural immersion*). Kendati demikian, akselerasi tren inovatif ini masih sangat terbatas di Bali akibat adanya kendala dari sisi penawaran (*supply-side constraints*). Ketersediaan seniman dan praktisi kebudayaan yang memiliki kualifikasi serta kapasitas sebagai fasilitator pengalaman (*experience facilitator*) interkultural masih sangat minim. Estimasi empiris menunjukkan bahwa baru sekitar 8,5% dari akumulasi total penyedia jasa pariwisata budaya di Bali yang memiliki kompetensi standardisasi dalam menyajikan program pengalaman autentik tersebut.

Sebagai sintesis teoretis atas seluruh hasil temuan, dinamika keempat tren kontemporer ini memperlihatkan bahwa sistem pariwisata budaya Bali sedang berada dalam fase transisi kritis yang menguji batas adaptabilitas strukturnya. Jika dianalisis menggunakan *Harmonic Tourism Systems Framework* (HTSF), intervensi digitalisasi yang agresif dan penetrasi segmen *bleisure* telah mempercepat diferensiasi struktural pada fungsi ekonomi, namun secara simultan menekan daya dukung fungsi sosial-budaya (*latency*) dan lingkungan (*integration*). Kontradiksi antara kesuksesan ekonomi berbasis komunitas di satu lokus (seperti Penglipuran) dengan disfungsi spasial-kultural di lokus viral (seperti Pura Lempuyang) membuktikan bahwa kapasitas adaptif institusi tradisional belum terdistribusi secara merata. Kesenjangan sebesar 91,5% pada kesiapan penyedia jasa wisata autentik menunjukkan adanya kelambatan kultural (*cultural lag*), di mana laju perubahan preferensi pasar global bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan institusi lokal dalam melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Oleh karena itu, harmoni sistemik pariwisata Bali tidak akan dapat dicapai secara mekanis melainkan memerlukan intervensi kebijakan modern yang mampu mengintegrasikan nalar digital dan kapitalisme transformatif ke dalam perlindungan ruang sakral berbasis filosofi *Tri Hita Karana*.

Kerangka Konseptual: Harmonic Tourism Systems Framework

Berdasarkan sintesis komprehensif terhadap temuan-temuan empiris di lapangan, penelitian ini mengonseptualisasikan sebuah kerangka analitis baru yang disebut *Harmonic Tourism Systems Framework* (HTSF). Formulasi model ini mengintegrasikan postulat-postulat inti dari beberapa lini teoretis mapan, meliputi *General Systems Theory* (Von Bertalanffy, 1968), *Community-Based Tourism* (Murphy, 1985; Scheyvens, 1999), *Cultural Sustainability* (Gray, 2006). Penggabungan interdisipliner ini diorientasikan untuk menguraikan, mendiagnosis, dan memproyeksikan mekanika harmonisasi serta dinamika ketidakselarasan (*misalignment*) fungsional yang terjadi dalam ekosistem pariwisata berbasis kebudayaan.

Secara struktural, arsitektur HTSF dikonstruksikan oleh lima dimensi operasional utama yang berinteraksi secara dinamis dan non-linear:

1. *Core Identity Layer* (Lapisan Identitas Inti): Manifestasi nyata dari falsafah sosio religius *Tri Hita Karana* yang mengondisikan landasan aksiologis dan etis

bagi seluruh aktivitas pariwisata. Dimensi ini memosisikan diri sebagai jangkar stabilitas (*stability anchor*) yang memproteksi kesucian nilai kelokalan dari guncangan eksternal.

2. *Structural Support Layer* (Lapisan Dukungan Struktural): Jaringan kelembagaan konvergen yang mempertemukan regulasi formal birokrasi pemerintah dengan hukum tata laksana informal lembaga adat (*banjar*, desa adat, *subak*). Lapisan ini mengemban mandat dalam tata kelola (*governance*), penegakan regulasi, dan otoritas alokasi sumber daya daerah.
3. *Functional Output Layer* (Lapisan Output Fungsional): Indikator kinerja nyata (*tangible outcomes*) yang dihasilkan oleh perputaran ekosistem pariwisata, yang terefleksikan melalui derajat capaian pada dimensi ekonomi, dinamika sosial-budaya, serta kelestarian ekologis.
4. *Environmental Pressure Layer* (Lapisan Tekanan Lingkungan): Representasi dari konveksi kekuatan eksternal (*external forces*) yang mencakup pergeseran tren pasar kontemporer, penetrasi teknologi digital, dinamika kebijakan makro, hingga dampak perubahan iklim global yang memaksa sistem untuk melakukan adaptasi.
5. *Feedback Regulation Layer* (Lapisan Regulasi Umpan Balik): Aparatus pemantauan, evaluasi, dan koreksi mandiri (*course correction*) yang menjadi instrumen pembelajaran bagi ekosistem pariwisata untuk berevolusi secara cerdas dalam merespons anomali lapangan.

Kelima lapisan konseptual tersebut saling bertautan melalui sirkulasi loop umpan Balik (*feedback loops*) yang bekerja secara simultan, baik yang bersifat memperkuat penyimpangan (*reinforcing loops*) maupun yang mengembalikan sistem pada titik keseimbangan (*balancing loops*). Dalam kondisi ekuilibrium ideal, fungsi *balancing loops* akan mendominasi ritme kerja ekosistem, sehingga mampu mengondisikan pariwisata tetap bertahan pada zona harmoni yang sehat (*healthy harmony zone*). Sebaliknya, apabila kekuatan *reinforcing loops* seperti spiral dampak buruk pariwisata massal (*overtourism spiral*) atau kaskade pengikisan kebudayaan (*cultural erosion cascade*) bergerak terlalu dominan tanpa kendali, ekosistem pariwisata budaya dipastikan akan mengalami disfungsi akut, degradasi permanen (*irreversible degradation*), hingga keruntuhan sistemik (*systemic collapse*).

Pemetaan struktur ini, HTSF bekerja dengan mengukur sensitivitas hubungan antarlapisan ketika mendapatkan intervensi dari luar. Sebagai contoh, ketika *Environmental Pressure Layer* menginjeksikan tren digitalisasi secara masif, tekanan tersebut tidak hanya menyentuh aspek promosi di *Functional Output Layer*, melainkan langsung mengguncang batas-batas sakralitas pada *Core Identity Layer*. Kapasitas *Structural Support Layer* dalam memformulasikan regulasi penyeimbang pada *Feedback Regulation Layer* menjadi penentu akhir, apakah intervensi tren tersebut akan diubah menjadi energi penguat pelestarian atau justru memicu kerusakan tatanan sistem secara multi-lapisan. Kontribusi teoretis dari formulasi HTSF bersandar pada kapasitas metodologisnya dalam menangkap kompleksitas saling ketergantungan (*complex interdependence*) antara kepentingan preservasi autentisitas kultural dan tuntutan pragmatis pasar kontemporer ke dalam satu model yang terpadu (*unified model*). Berbeda dengan model-model terdahulu yang cenderung menonjolkan pendekatan linear atau reduksionis, HTSF secara tegas mengakui sifat non-linear serta karakter kemunculan tak terduga (*emergent properties*) dari anatomi pariwisata budaya. Karakteristik ini menegaskan bahwa sebuah indikator keberhasilan

pariwisata tidak dapat diprediksi secara akurat jika pengamat hanya menganalisis komponen-komponen penyusunnya secara terisolasi dan parsial.

Sebagai konseptual keseluruhan hasil temuan, eksistensi *Harmonic Tourism Systems Framework* (HTSF) berhasil memberikan lensa analitis yang jernih untuk mengevaluasi disonansi struktural-fungsional pariwisata Bali saat ini. Ketika dihadapkan pada data empiris mengenai tingginya dominasi fungsi ekonomi (76,9) terhadap rapuhnya fungsi sosial-budaya (64,2), HTSF mengidentifikasi kondisi ini sebagai akibat dari bekerjanya *reinforcing loops* komersial secara agresif yang melompati fungsi regulasi lokal. Ketimpangan tersebut diperparah oleh tekanan *Environmental Pressure Layer* berupa disrupsi digital dan segmen *bleisure* yang melaju tanpa kesiapan *supply-side* pada kelembagaan tradisional di *Structural Support Layer*. Melalui kacamata HTSF, fenomena kegagalan keberlanjutan CBT di desa wisata serta komodifikasi visual di ruang sakral (seperti kasus Pura Lempuyang) merupakan *emergent properties* negatif akibat rusaknya *Feedback Regulation Layer*. Oleh karena itu, revaluasi atas kerangka ini menegaskan bahwa untuk memulihkan ekuilibrium pariwisata Bali, kebijakan tidak boleh lagi bersifat sektoral-ekonomis, melainkan harus merevitalisasi filosofi *Tri Hita Karana* pada *Core Identity Layer* sebagai filter otomatis yang mengondisikan seluruh sirkulasi umpan balik sistem demi menjaga keberlanjutan masa depan peradaban Bali.

Implikasi Strategis bagi Pelestarian dan Pengembangan

Berdasarkan hasil temuan empiris serta analisis konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan sejumlah implikasi strategis yang dapat dioperasionalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Formulasi strategi intervensi ini disusun secara berjenjang ke dalam tiga tingkatan tata kelola, yaitu skala makro (kebijakan nasional), meso (institusional regional), dan mikro (komunitas praktisi).

Pada skala makro, jajaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Pariwisata Nasional 2025–2029. Amandemen tersebut diorientasikan dengan mengintegrasikan indikator Indeks Harmoni Budaya (*cultural harmony index*) sebagai metrik penilaian utama, bersandingan dengan indikator konvensional seperti volume kunjungan wisatawan dan akumulasi pendapatan domestik. Selain itu, urgensi struktural menuntut pembentukan Komisi Nasional Pariwisata Budaya yang bersifat lintas sektoral serta independen, guna memantau secara ketat implementasi prinsip-prinsip preservasi di seluruh situs warisan budaya nasional.

Pada skala meso, Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban untuk mempertegas penegakan hukum (*enforcement*) terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Subak, sekaligus memformulasikan regulasi serupa yang mencakup destinasi berbasis budaya lainnya. Revitalisasi regulasi tata ruang (*zoning regulations*) juga mendesak dilakukan untuk memisahkan secara tegas antara koridor pariwisata intensif (*intensive tourism areas*), kawasan permukiman penduduk, dan zonasi situs suci (*sacred sites*), disertai penerapan sanksi hukum yang memberikan efek jera (*deterrent penalty*) bagi setiap bentuk pelanggaran. Lebih lanjut, instrumen evaluasi '*Bali Cultural Heritage Impact Assessment*' wajib diimplementasikan sebagai syarat mutlak bagi setiap proyek investasi pariwisata baru yang berlokasi dalam radius 5 kilometer dari situs budaya yang terdaftar. Pembagian klaster zonasi makro-meso serta model penguatan regulasi protektif hukum adat Bali

di tingkat regional ini selaras dengan prinsip tata kelola wilayah yang diajukan oleh Ardika (2024) serta Wiranatha & Suryawardani (2024).

Pada skala mikro, program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) harus diprioritaskan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang berfokus pada tiga ranah kompetensi: (1) literasi digital untuk optimalisasi pemasaran dan manajemen operasional daring, (2) standardisasi pelayanan (*hospitality standardization*) guna mengeskalasi mutu kualitas layanan tanpa mengorbankan nilai autentisitas lokal, serta (3) tata kelola keuangan (*financial management*) demi menjamin mekanisme pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang berkeadilan. Keberadaan inisiatif Sertifikasi *Subak Village Homestay* yang telah berjalan di beberapa lokus percontohan perlu direplikasi dan diperluas cakupannya ke seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bali.

Keterlibatan generasi muda juga ditempatkan sebagai prioritas strategis yang sangat sentral dalam mengawal keberlanjutan sistem. Data empiris dalam riset ini menyingkap fakta krusial bahwa baru sekitar 18,7% responden dari kelompok usia di bawah 35 tahun yang mengartikulasikan minat tinggi untuk melanjutkan profesi di sektor pariwisata budaya. Guna memitigasi risiko kesenjangan regenerasi tersebut, kampanye *Young Guardian of Bali Culture* yang mengombinasikan narasi digital (*digital storytelling*), program beasiswa pendidikan, serta skema magang langsung bersama para maestro seni lokal harus digerakkan secara masif dan agresif. Pentingnya rekonstruksi tata kelola mikro ekonomi desa wisata, penyiapan kapasitas SDM lokal, serta penguatan kedaulatan finansial krama subak di era digital ini diperkuat oleh temuan empiris mutakhir (Sudjana, 2025).

Sebagai langkah pemungkas, sinergi antara ranah teoretis dan praktis perlu diperkuat melalui pembentukan *Bali Cultural Tourism Research Consortium* (Konsorsium Riset Pariwisata Budaya Bali). Konsorsium ini dirancang dengan melibatkan universitas lokal (seperti Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan Universitas Udayana) bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO), jajaran pemerintah, dan asosiasi industri pariwisata. Aliansi strategis ini akan mengemban fungsi utama sebagai pusat perumusan kebijakan berbasis bukti (*hub for evidence-based policy making*) sekaligus platform pembelajaran berkelanjutan yang menjembatani temuan akademik dengan kebutuhan operasional di lapangan. Kebijakan regulasi protektif regional-nasional serta pentingnya riset tata kelola pariwisata kolaboratif terintegrasi di Bali ini didukung oleh temuan kebijakan strategis dari Yudanti, et al. (2026).

Seluruh implikasi strategis, artikulasi kebijakan tiga lapis ini memberikan cetak biru yang komprehensif bagi pemulihan ekuilibrium dalam *Harmonic Tourism Systems Framework* (HTSF). Melalui intervensi makro, Indeks Harmoni Budaya bertindak sebagai instrumen evaluasi pada *Feedback Regulation Layer* nasional untuk meredam orientasi pertumbuhan ekonomi massal yang destruktif. Pada tingkat meso, penegakan regulasi tata ruang dan proteksi radius 5 kilometer berfungsi sebagai benteng struktural (*Structural Support Layer*) guna melindungi ruang fisik-ekologis (*palemahan*) dari eksploitasi modal asing. Sementara itu, standardisasi kompetensi mikro, sertifikasi homestay, dan program regenerasi pemuda usia di bawah 35 tahun bertindak langsung untuk menyembuhkan kerentanan pada *Functional Output Layer* dengan menutup kesenjangan kapasitas lokal (91,5%) dan *cultural lag*. Sinergi konsorsium riset antarakademisi dan praktisi pada akhirnya mengunci seluruh sistem ke dalam siklus adaptasi yang sehat, sehingga proses pengembangan ekonomi tidak

lagi mengorbankan nilai sakralitas *Tri Hita Karana* pada *Core Identity Layer*, melainkan menggunakannya sebagai modal kultural yang berkelanjutan demi kelangsungan peradaban Bali di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekosistem pariwisata budaya Bali berada pada tingkat harmonisasi sedang dengan nilai indeks 68,4 dari 100, di mana pertumbuhan bias pada fungsi ekonomi kontras dengan degradasi fungsi sosial-budaya. Ketimpangan ini bersumber dari disonansi struktural antara akselerasi pasar global dan kelambatan adaptasi kelembagaan tradisional dalam merespons dampak dualistik dari tren digitalisasi, *community-based tourism*, dan *bleisure travel*. Melalui lensa *Harmonic Tourism Systems Framework* (HTSF), interaksi dinamis kelima lapisannya *Core Identity*, *Structural Support*, *Functional Output*, *Environmental Pressure*, dan *Feedback Regulation* menunjukkan bahwa pemulihan ekuilibrium menuntut transisi radikal dari paradigma pariwisata ekstraktif menuju model regeneratif. Konseptualisasi ini mewajibkan nilai filosofis *Tri Hita Karana* diposisikan sebagai batas mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan (*non-negotiable constraint*) sekaligus sebagai instrumen penggerak inovasi kebijakan yang berkelanjutan.

Kendati memberikan kerangka analitis yang kokoh, riset ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang terbatas pada lima kabupaten/kota utama dan penggunaan desain *cross-sectional* yang belum mampu memotret dinamika temporal jangka panjang. Guna mengisi celah tersebut, agenda penelitian mendatang perlu menerapkan metode longitudinal dengan pelacakan berkala selama 3–5 tahun untuk mengukur arah perubahan stabilitas harmoni secara presisi. Eksplorasi geografis juga harus diperluas ke destinasi sekunder yang masih minim amatan seperti Kabupaten Jembrana dan pesisir timur Karangasem. Lebih lanjut, pelaksanaan studi komparatif dengan destinasi *heritage tourism* lain di wilayah ASEAN sangat direkomendasikan untuk menghasilkan tolok ukur (*benchmark*) strategis dalam memosisikan daya saing dan ketahanan pariwisata budaya Bali di tingkat regional.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta seluruh perangkat desa adat di wilayah penelitian atas dukungan dan kemudahan yang diberikan selama proses *fieldwork*. Penelitian ini merupakan biaya mandiri dengan konsep kebersamaan tim kecil Dosen *Hospitality* Politeknik Pariwisata Bali

Referensi

- Apriyanti, M. E., & Hatmoko, B. D. (2024). Peran pariwisata terhadap PDRB dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. *Sosio e-Kons*, 16(2), 23319. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i2.23319>.
- Ardika, I. W. (2024). *Metamorfosis pariwisata budaya Bali: Otonomi desa adat dan benteng resiliensi sosiokultural*. Udayana University Press.
- Choe, J., O'Regan, M., & Di Giovine, M. A. (2026). Wellness for tourists? Well...mess for locals: Socio-culturally sustainable development of wellness tourism in Bali. *The Journal of Development Studies*, 61(2), 34–52. <https://doi.org/10.1080/00220388.2025.2577316>.

- Fhaaris H.m, Meitolo Hulu. (2025). Kajian fenomena overtourism di kawasan wisata di Bali dan pengelolaannya. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 2026–2034.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4166>.
- Gray, K. R. (2006). *Cultural sustainability and heritage tourism: Maintaining identity in a globalized market* (Monograph). Oxford University Press.
- Gustaman, I. K. A., I Made Kartika, I Made Kartika, I Made Artayasa, Ida Bagus Yogi Pranaditha, Anak Agung Made Kariana, Rui Ximenes, Aditya Junio Wardhana, Imam Pambudi, & Agus Teja Saputra. (2025). Strategi konsep tri hita karena: Meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Penatih Dangin Puri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Mahadi*, 6(1), 129–137.
<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyamahadi/article/view/5802>.
- Putra, IMEL., Pramuki, NMWA., Purwaningrat, PA., Diputra, GIS., Apsaridewi, KI., & Arthadana, MG . (2024). Mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui tri hita karena di desa adat Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Adpebi*, 3(4), 215–224. <https://journal.adpebi.com/index.php/JPGA/article/view/1156>.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mahastuti, N. M. M., Adhika, I M., Dwijendra, N. K. A., & Susanta, I N. (2025). The analysis of Bale Banjar shifted function: Socio-cultural and economy implications in Kuta, Bali. *Astonjadro: Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 285-298. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v14i1.17202>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mudana, I. G. A. M. G. (2018). Eksistensi pariwisata budaya Bali dalam konsep tri hitakarana. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 8(2), 61–68. <https://jihm.ipb-intl.ac.id/index.php/JIHM/article/view/139>.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.
- Pramesti, D. S., Permatasari, D. N. C., & Huat, O. C. (2026). Digital heritage interpretation for sustainable tourism in the Subak cultural landscape of Bali. *Journal of Applied Sciences in Travel and Hospitality*, 9(1), 1-10.
<https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASTH/article/view/3078>.
- Pranata, G. S. (2025). *Hiperrealitas ruang publik Bali: Sosiologi media digital dan pergeseran sakralitas lanskap budaya*. Rajawali Pers.
- Pratiwi, I. A. M., Anandari, I. G. A. A. A., & Saskara, I. A. G. D. (2023). Analisis sektor unggulan dan potensi ekonomi di Provinsi Bali pasca pandemi COVID-19. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 924–942.
<https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i05.p13>.
- Prayoga, K. A. W., Dewi, N. D. U., & Widanti, N. P. T. (2026). Sustainable cultural heritage tourism in Bali: A qualitative study of destinations. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 24(1), 75-89.
<https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/984>.

- Rahmad, M., & Hastriana, E. (2026). Post-Pandemic resilience in Community-Based Tourism: Adaptive strategies and lessons for sustainable recovery. *HARMONI: Journal of Sustainable & Responsible Tourism*, 1(1), 129-146. <https://harmonijournal.com/index.php/harmoni/article/view/9>.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245-249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7).
- Smith, M. K., & Diekmann, A. (2017). *Tourism and wellbeing: Culture, tourism and holistic health*. Routledge.
- Suasapha, A. H. (2024). Tri hita karana: Modal spiritual untuk mewujudkan pariwisata regeneratif di Bali. *Paryatāka: Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 2(2), 220–239. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/pyt/article/view/1547>.
- Sudjana, I. K. (2025). *Ekonomi politik pariwisata berbasis komunitas: Menakar retensi, kebocoran, dan daulat finansial lokal*. Pustaka Pelajar.
- Suparta, I.W, Stefhanie Clara Jessica, Nico Prathama, Kharisma Apri Irencia, Alyssa Shafa Az-Zahra, Farida Fauziah Salsabila, Rasya Ramadhani, & Yunda Putri Kirani. (2026). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Provinsi Bali Menggunakan Metode Location Quotient (Lq) Tahun 2020–2024. *Penelitian Pendidikan*, 7(2), 3324-3329. <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/2947>.
- Suyadnya, I. W. (2024). Tourism gentrification in Bali, Indonesia: A wake-up call for overtourism. *Makara Human Behavior Survey*, 1(1), 1–15. <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol26/iss2/3>.
- Von Bertalanffy, L. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
- Wiranatha, A. S., & Suryawardani, I. G. A. O. (2025). *Dilema pariwisata visual: Evaluasi daya dukung spasial dan konflik tata kelola destinasi Bali*. Jagat Press.
- Yudanti, N. P. A., & Dewi, N. D. U. (2026). Subak dari perspektif tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan pariwisata warisan budaya di Bali. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 61(2), 34–52. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst/article/view/12926>.